

Model L – EARN dalam Analisis Kebijakan Merdeka Belajar Sebagai Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan

Siti Hajar Nurhasanah, Ahmad Suriansyah, Sulistiyana Sulistiyana
Universitas Lambung Mangkurat
Jl. Brigjen H. Hasan Basri, Kayu Tangi, Banjarmasin.
Correspondence: 2541216320001@mhs.ulm.ac.id

Abstract: The Merdeka Belajar policy was launched to improve the quality of education by strengthening school autonomy and providing flexibility in the learning process. However, its implementation still faces several challenges, particularly regarding human resource readiness, capacity disparities between schools, and weak policy analysis at the school level. This study analyzes the implementation of the Merdeka Belajar policy using the L-EARN (Listen, Empathize, Analyze, Recommend, Navigate) Model as a framework. The method used was an Integrative Literature Review (ILR) by reviewing various leading international journal articles and national education policy documents. Data analysis was conducted through four stages: content analysis, thematic mapping, conceptual model development, and contextual analysis. The results show that the main challenges in implementing this policy include limited teacher capacity, low levels of data literacy in schools, and suboptimal instructional leadership. The use of the L-EARN Model helps identify gaps between regulations and learning practices and provides a more contextual and sustainable direction for policy improvement. The conclusions of this study indicate that the implementation of Merdeka Belajar requires an adaptive, participatory, and sustainable policy learning process to truly drive improvements in education quality.

Keywords: Independent Learning; education policy analysis; L-EARN Model; education quality

Abstrak: Kebijakan Merdeka Belajar dicanangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memperkuat otonomi sekolah serta memberikan fleksibilitas dalam proses pembelajaran. Meski demikian, pelaksanaannya masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, terutama menyangkut kesiapan sumber daya manusia, ketimpangan kapasitas antar sekolah, dan lemahnya analisis kebijakan di tingkat sekolah. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan Merdeka Belajar dengan menggunakan Model L-EARN (Listen, Empathize, Analyze, Recommend, Navigate) sebagai kerangka berpikir. Metode yang digunakan berupa *Integrative Literature Review* (ILR) dengan mengkaji berbagai artikel jurnal internasional terkemuka dan dokumen kebijakan pendidikan nasional. Analisis data dilakukan melalui empat tahapan: analisis konten, pemetaan tematik, pengembangan model konseptual, dan analisis kontekstual. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tantangan utama dalam implementasi kebijakan ini antara lain keterbatasan kapasitas guru, rendahnya tingkat literasi data di sekolah, dan belum optimalnya kepemimpinan pembelajaran. Penggunaan Model L-EARN membantu mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi dan praktik pembelajaran serta memberikan arah perbaikan kebijakan yang lebih kontekstual dan berkelanjutan. Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Merdeka Belajar membutuhkan proses pembelajaran kebijakan yang adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan untuk benar-benar mendorong peningkatan mutu pendidikan.

Kata kunci: Merdeka Belajar; analisis kebijakan pendidikan; Model L-EARN; mutu pendidikan

Kebijakan Merdeka Belajar merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperbaiki mutu pendidikan nasional, dengan menekankan kemandirian sekolah, keluwesan kurikulum, serta pembelajaran yang berfokus pada peserta didik. Kebijakan ini hadir sebagai jawaban atas tantangan pendidikan masa kini, seperti kebutuhan penguatan kompetensi, pemanfaatan teknologi, dan pemerataan kualitas pembelajaran (Rohmatika, 2023). Merdeka Belajar diharapkan mendorong sekolah dan guru menjadi motor utama perubahan. Namun, sejak diterapkan, kebijakan ini menghadapi kendala baik secara struktural maupun kultural. Banyak sekolah masih belum benar-benar memahami Merdeka Belajar sebagai upaya peningkatan mutu pembelajaran, melainkan sekadar perubahan administratif (Norainun, 2024). Akibatnya, pelaksanaan di lapangan kerap tidak seragam dan belum memberikan dampak optimal terhadap kualitas pendidikan.

Situasi ini menyebabkan terjadinya perbedaan kualitas pelaksanaan kebijakan di tiap satuan pendidikan. Pada beberapa sekolah, Merdeka Belajar berhasil mendorong inovasi dalam pembelajaran, sedangkan di sekolah lain, implementasinya masih bersifat simbolis dan administratif. Kesenjangan kapasitas sumber daya manusia tersebut berdampak langsung pada capaian mutu pembelajaran dan pemerataan kualitas pendidikan (Lembong et al., 2023).

Selain itu, Kebijakan Merdeka Belajar memiliki kerangka hukum nasional sebagai acuan, yaitu: 1. (Permendikbud, 2020) tentang Rencana Strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2. (Permendikbud, 2022) tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran 3. (Permendikdasmen, 2025) tentang Pembelajaran Mendalam dan Pemanfaatan Kecerdasan Buatan dalam Pembelajaran. Penyelenggaraan Asesmen Nasional dan SP merupakan alat pengukuran lain pendidikan mutu pembelajaran. Pada kenyataannya, dokumen kebijakan tersebut meski telah memetakan arah kebijakan bersifat progresif.

Sejumlah persoalan implementasi tersebut menunjukkan bahwa analisis kebijakan Merdeka Belajar tidak cukup hanya dibatasi dalam hal kepatuhan administratif sekolah atau konsistensi dengan regulasi. Dibutuhkan kerangka analisis kebijakan yang dapat membaca keadaan kontekstual satuannya pendidikan, memahami kondisi dan peran aktor kebijakan, menelusuri akar permasalahan implementasi, sekaligus mengawal proses pelaksanaan kebijakan secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, pada dasarnya penelitian ini menggunakan model pendekatan analitis Model L-EARN (*Listen, Empathize, Analyze, Recommend, Navigate*) untuk mendalami dinamika implementasi kebijakan Merdeka Belajar secara komprehensif. Model ini dipilih karena proses pembelajaran kebijakan yang kontekstual, partisipatif, dan adaptatif mampu menjelaskan hubungan dan menjembatani antara regulasi kebijakan dengan praktik pembelajaran di sekolah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Merdeka Belajar menggunakan Model L-EARN sebagai kerangka analisis kebijakan. Secara khusus, penelitian ini berupaya mengidentifikasi hambatan implementasi kebijakan, menganalisis kesenjangan antara regulasi dan praktik pembelajaran di sekolah, serta merumuskan arah perbaikan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Kontribusi penelitian ini

diharapkan dapat memperkaya kajian analisis kebijakan pendidikan serta memberikan dasar konseptual bagi penguatan implementasi Merdeka Belajar secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode Tinjauan Literatur Integratif (*Integrative Literature Review/ILR*). Metode ini dipilih karena dapat mengintegrasikan hasil-hasil empiris dan konsep dari berbagai penelitian guna membangun pemahaman komprehensif mengenai implementasi kebijakan pendidikan. ILR memiliki sifat sintesis dan memungkinkan pengembangan kerangka konseptual kebijakan yang adaptif serta kontekstual, terutama untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar di tingkat sekolah (Barlian et al., 2023).

Analisis dilakukan melalui empat tahapan sistematis: analisis konteks, pemetaan tematik, pengembangan model konseptual, dan analisis kontekstual. Data penelitian diambil dari artikel jurnal internasional bereputasi yang membahas implementasi kebijakan publik dan pendidikan, serta dokumen kebijakan pendidikan nasional yang relevan. Pemilihan artikel didasarkan pada kriteria inklusi dan eksklusi untuk menjamin relevansi dan kualitas literatur. Model L-EARN (*Listen, Empathize, Analyze, Recommend, Navigate*) digunakan sebagai kerangka analisis untuk menafsirkan dinamika pelaksanaan kebijakan, mengidentifikasi hambatan, dan merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan yang berfokus pada peningkatan mutu pendidikan. Kriteria inklusi dan eksklusi ditetapkan agar literatur yang dianalisis benar-benar relevan, kredibel, dan sesuai tujuan penelitian. Kriteria ini membantu peneliti memilih artikel yang tepat sekaligus menghindari literatur yang tidak mendukung analisis kebijakan Merdeka Belajar.

Tabel 1. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kategori	Kriteria Inklusi	Kriteria Eksklusi
Jenis Sumber	Artikel jurnal, buku, laporan resmi pemerintah, dokumen kebijakan, dan publikasi ilmiah	Blog pribadi, opini media, konten tanpa dasar ilmiah
Topik	Membahas Merdeka Belajar, Kurikulum Merdeka, mutu pendidikan, atau analisis kebijakan	Topik tidak terkait pendidikan atau tidak membahas kebijakan
Tahun Publikasi	Terbit dalam 10 tahun terakhir atau lebih lama jika sangat relevan	Literatur lama yang tidak relevan dengan konteks kebijakan saat ini
Aksesibilitas	Tersedia dalam bentuk teks lengkap (full text)	Hanya tersedia abstrak atau cuplikan
Kredibilitas	Terbit pada jurnal bereputasi, sumber resmi pemerintah, atau lembaga penelitian	Sumber tidak terverifikasi atau tidak memiliki standar ilmiah
Bahasa	Bahasa Indonesia atau Inggris	Bahasa lain yang tidak dapat diverifikasi

Sumber : Olah Data Peneliti, 2026

Analisis pada penelitian ini dilakukan secara sistematis dan saling terhubung. Tahap awal berupa Analisis Konten, yakni telaah mendalam terhadap setiap artikel terpilih untuk mengidentifikasi

strategi kebijakan, faktor pendukung keberhasilan, hambatan pelaksanaan, serta konteks kebijakan pada masing-masing penelitian. Tujuan tahap ini adalah memperoleh gambaran komprehensif tentang dinamika evaluasi, implementasi, dan perumusan kebijakan (Khanal et al., 2025). Selanjutnya, dilakukan Pemetaan Tematik dengan mengelompokkan hasil analisis isi ke dalam dimensi utama siklus kebijakan publik: perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi. Proses pemetaan dilakukan melalui pengkodean terbuka dan aksial guna memetakan hubungan antar komponen kebijakan (Badar & Hidayat, 2023). Tahap ketiga adalah Pemodelan Konseptual, yaitu proses menggabungkan seluruh hasil pemetaan tematik ke dalam sebuah kerangka faktor. Model konseptual yang dibuat mencakup faktor-faktor utama implementasi kebijakan yang ditemukan pada tahap sebelumnya, termasuk keterpaduan antara proses kebijakan, peran para aktor, serta konteks kelembagaan yang melingkupinya. Model ini juga menunjukkan baik hubungan langsung maupun tidak langsung antar variabel, serta mekanisme umpan balik yang menjelaskan bagaimana perubahan pada satu unsur bisa memengaruhi dinamika kebijakan secara keseluruhan. Selain itu, kerangka ini diperkuat dengan unsur penguatan normatif agar proses kebijakan sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan.

Tahap keempat adalah Analisis Kontekstual, yaitu proses menilai model kebijakan yang telah disusun dalam konteks kebijakan pendidikan nasional di Indonesia. Pada tahap ini, relevansi model terhadap penerapan peraturan terbaru mengenai pembelajaran mendalam dan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam pendidikan dianalisis secara khusus. Tujuan analisis kontekstual adalah menguji kesesuaian, validitas, serta kegunaan model dalam praktik kebijakan pendidikan di Indonesia. Proses ini diperkuat melalui triangulasi konseptual dengan merujuk pada studi tentang kepemimpinan transformasional, tata kelola adaptif, dan pembelajaran kebijakan (Zhang et al., 2024). Dengan demikian, ILR memadukan berbagai sumber literatur untuk membangun kerangka model kebijakan yang strategis, relevan, dan aplikatif pada tataran implementasi pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Penelitian yang menggunakan pendekatan Tinjauan Pustaka Integratif (*Integrative Literature Review/ILR*) menemukan empat tahapan sistematis yang saling melengkapi, yaitu analisis konten, pemetaan tematik, pemodelan konseptual, dan analisis kontekstual. Keempat tahapan ini membentuk rangkaian analisis yang terintegrasi dalam memahami dinamika kebijakan pendidikan, khususnya pada kebijakan pembelajaran berbasis pembelajaran mendalam dan kecerdasan buatan (AI). Analisis konten memberikan wawasan mendalam tentang strategi kebijakan, tantangan implementasi, serta faktor-faktor keberhasilan yang ditemukan dalam berbagai literatur. Temuan tersebut kemudian dipetakan secara tematik untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan struktur dalam siklus kebijakan publik. Pemodelan konseptual lalu merangkum temuan tematik ke dalam model kebijakan yang menggambarkan keterkaitan antar variabel, peran para aktor, serta mekanisme umpan balik dalam pelaksanaan kebijakan. Tahap akhir, analisis kontekstual, menempatkan model kebijakan tersebut

dalam konteks kebijakan pendidikan nasional Indonesia, sehingga model yang dihasilkan menjadi relevan, adaptif, dan sesuai kebutuhan implementasi kebijakan terkini. Secara keseluruhan, integrasi keempat tahapan ILR ini menghasilkan model kebijakan publik yang lebih fleksibel, responsif, dan mudah diadaptasi untuk mendukung perubahan serta pengembangan kebijakan pendidikan berbasis pembelajaran mendalam dan kecerdasan buatan di Indonesia.

Tabel 2. Hasil analisis dan integrasi dari literatur

Penulis, Tahun	Judul	Jurnal (Indeksasi)	Metode	Desain	Temuan	Dimensi Kebijakan
(Rosidin et al., 2025)	<i>Exploring Educational Policy Innovation and Curriculum Development in Indonesian Higher Education: A Systematic Review</i>	Journal of Education Culture and Society (Scopus)	Tinjauan pustaka sistematis	Kajian literatur komprehensif	Kurikulum Merdeka Belajar memilih jalur belajar, namun masih ada kesenjangan fasilitas antar sekolah	Pelaksanaan (evaluasi kebijakan), Kepemimpinan (peran siswa), Kesetaraan (distribusi sumber daya).
(Arar et al., 2024)	<i>A critical analysis of education policy in turbulent times: A comparative study</i>	Power and Education (Scopus Q2)	Analisis kualitatif komparatif (kajian dokumen)	Studi kasus komparatif (5 negara MENA, COVID-19)	Kebijakan pendidikan awalnya sentralistik menghadapi kendala daring dan hambatan struktural, serta kurang inovatif dan merata.	Implementasi (sentralisasi kebijakan, hambatan teknis); Kepemimpinan (top-down); Ekuitas (hasil pendidikan tidak merata).
(Oo et al., 2025)	<i>Shaping leadership and inclusive education: insights from Cambodia, Myanmar, and Vietnam</i>	International Journal of Developmental Disabilities (Scopus)	Studi kasus komparatif kualitatif (peneliti lokal)	Studi kasus komparatif (3 negara Asia Tenggara)	Pendidikan inklusif didorong SDG4, tapi terhambat pelatihan guru, infrastruktur, dan stigma. Diperlukan kepemimpinan sekolah, kebijakan kuat, dan	Kepemimpinan (kepala sekolah inklusif), Kolaborasi (lintas sektor), Implementasi kebijakan inklusi), Ekuitas pendidikan tanpa diskriminasi

					kolaborasi sektor.	i.
(Holst et al., 2025)	Sustainability at the core of quality education: Wished for by principals but requiring collective and structural action	Cleaner Production (Scopus Q1)	Nasional (n=1310) dan wawancara (mixed method)	Mixed Method (survey&wawancara di sekolah)	80% kepala sekolah ingin pendidikan berkelanjutan jadi prioritas, tapi praktiknya masih minim dan terkendala sumber daya serta struktur. Diperlukan prioritas kebijakan dan kerja kolektif.	Berkelanjutan Kepemimpinan (perspektif kepala sekolah) Implementasi (kebijakan berkelanjutan belum terintegrasi Kolaborasi (aksi kolektif antar pemangku kebijakan)
(Ghamrawi, 2023)	Toward agenda 2030 in education: policies and practices for effective	Education Research for Policy and Practice (Scopus Q2)	Review kebijakan dan wawancara mendala (MOE)	Studi kasus nasional (Katar, kerangka UNESCO)	Menegaskan bahwa otonomi sekolah, kepemimpinan intruksional, dan tata kelola (governance) memainkan peran krusial	Kepemimpinan intruksional implementasi kerangka regulasi

Sumber : Olah Data Peneliti, 2026

Lima artikel ilmiah internasional yang berkaitan dengan implementasi dan efektivitas kebijakan pendidikan dianalisis secara mendalam dan kritis guna menunjang analisis isi dalam penelitian ini. Setiap artikel ditelaah untuk menggali pendekatan kebijakan yang diterapkan, faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi, serta tantangan struktural dan kultural yang dihadapi. Analisis terhadap kelima artikel tersebut mengungkapkan adanya variasi metode dan perspektif dalam memahami dinamika implementasi kebijakan pendidikan di berbagai negara, sekaligus memberikan wawasan bermakna bagi analisis kebijakan Merdeka Belajar sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia

Selanjutnya, hasil pemetaan tematik dimasukkan ke dalam sebuah model analisis kebijakan pendidikan yang disebut Model L-EARN. Model ini memiliki lima tahap utama: *Listen, Empathize, Analyze, Recommend, dan Navigate*. Kelima tahap tersebut merupakan satu rangkaian proses analisis kebijakan yang bersifat siklus, dinamis, dan berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan.

Tahap *Listen* bertujuan mengidentifikasi isu-isu utama yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar. Dengan melakukan analisis dokumen, kajian literatur, serta identifikasi kebutuhan di

lapangan, tahap ini menyoroti berbagai tantangan implementasi seperti ketimpangan sumber daya, kemampuan guru, dan kesiapan teknologi pembelajaran. Dengan demikian, analisis kebijakan diawali dari pemahaman yang mendalam atas permasalahan nyata di sekolah.

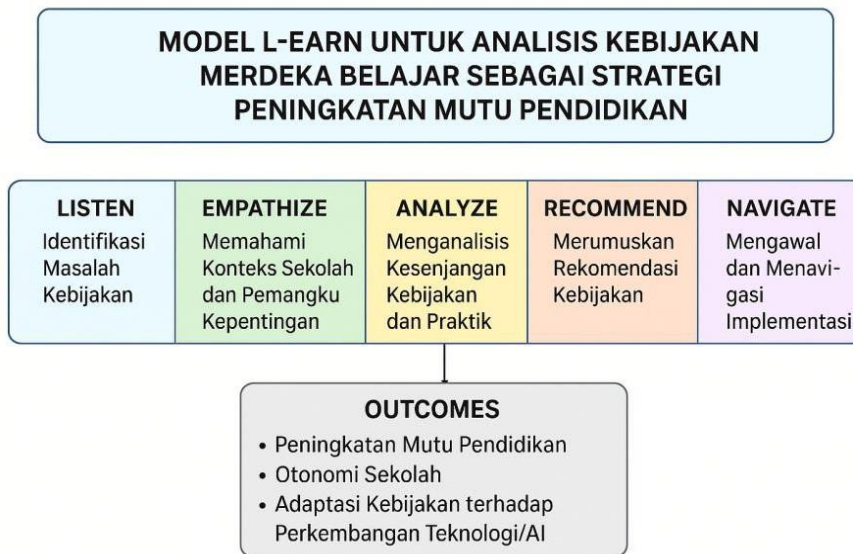
Tahap *Empathize* bertujuan memperdalam pemahaman mengenai konteks sosial, budaya, dan struktural yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Melalui pendekatan empatik, dapat diketahui bagaimana guru, siswa, kepala sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya merasakan, memahami, serta mengalami kebijakan Merdeka Belajar secara langsung. Pemahaman ini sangat penting agar analisis kebijakan tetap relevan dengan kondisi nyata ekosistem pendidikan.

Tahap *Analyze* menitikberatkan pada pengkajian perbedaan antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan. Pada tahap ini, dilakukan analisis secara menyeluruh terhadap kesiapan sekolah, keselarasan kebijakan, efektivitas kepemimpinan, budaya kolaborasi, dan tata kelola pelaksanaan. Hasil analisis ini menjadi landasan dalam merumuskan rekomendasi peningkatan mutu pendidikan yang sesuai dan kontekstual.

Tahap *Recommend* menghasilkan usulan kebijakan yang dapat diterapkan, didasarkan pada bukti empiris dan hasil analisis. Rekomendasi meliputi strategi peningkatan kapasitas guru, penyediaan dukungan sarana dan prasarana, perbaikan tata kelola, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi. Usulan tersebut tidak hanya menyoroti masalah struktural, tetapi juga menawarkan langkah-langkah praktis untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran di sekolah.

Tahap akhir, *Navigate*, berfokus pada strategi pengawalan pelaksanaan kebijakan. Pada tahap ini, monitoring, evaluasi, dan penyesuaian dilakukan secara berkelanjutan agar rekomendasi dapat diimplementasikan secara optimal. *Navigate* juga melibatkan pengembangan mekanisme umpan balik (*feedback loop*) sehingga penerapan Merdeka Belajar dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dan perkembangan pendidikan nasional.

Secara umum, Model L-EARN menawarkan kerangka analisis yang terstruktur dan menyeluruh untuk menelaah serta memperbaiki kebijakan Merdeka Belajar. Dengan menggabungkan proses identifikasi masalah, pemahaman konteks, analisis yang mendalam, rekomendasi strategis, dan panduan implementasi, model ini dapat memberikan arah kebijakan yang lebih fleksibel, responsif, dan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan.



Gambar 1. Model Konseptual L–EARN untuk Analisis Kebijakan Merdeka Belajar sebagai Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan

Sumber: Olah data peneliti, 2025

Model L-EARN terdiri atas lima tahap analisis yaitu: *Listen, Empathize, Analyze, Recommend, dan Navigate* yang bersama-sama membangun sistem kebijakan yang bersifat siklis, dinamis, dan adaptif. Model ini dirancang untuk memahami perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan Merdeka Belajar secara bertingkat dan sesuai konteks. L-EARN menonjolkan proses analisis yang berjalan berurutan sekaligus saling memengaruhi secara non-linier, didukung oleh feedback loop untuk memastikan mutu pendidikan terus meningkat secara berkelanjutan.

Hubungan Langsung (*Direct Relations*)

Alur proses *Listen* → *Empathize* → *Analyze* → *Recommend* → *Navigate* menggambarkan tahapan yang linear dan saling mendukung. *Listen* menjadi tahap awal untuk mengenali permasalahan utama dalam pelaksanaan Merdeka Belajar, seperti keterbatasan sumber daya, kebutuhan tenaga pendidik, serta tantangan digitalisasi. Data yang didapat pada tahap ini memperdalam proses *Empathize*, yang menitikberatkan pada pemahaman aspek sosial, budaya, dan kelembagaan di lingkungan sekolah. Hasil empati ini meningkatkan mutu analisis di tahap *Analyze*, dengan menyoroti ketidaksesuaian antara kebijakan dan praktik di lapangan. Temuan analisis tersebut menjadi dasar dalam tahap *Recommend*, yaitu penyusunan rekomendasi berbasis bukti (Riedho & Angga, 2024). Tahap akhir, *Navigate*, bertujuan memastikan implementasi rekomendasi melalui strategi pendampingan, pemantauan, dan penyesuaian kebijakan.

Hubungan Tidak Langsung (*Indirect Relations*)

Dalam Model L-EARN, hubungan tidak langsung tampak melalui panah silang yang menghubungkan tahapan-tahapan yang saling memengaruhi secara fungsional meskipun tidak berurutan. Contohnya, hasil dari tahap *Empathize* bisa langsung berdampak pada tahap *Recommend* jika pemahaman kebutuhan sekolah sudah cukup sehingga rekomendasi dapat diberikan tanpa analisis teknis mendalam. Begitu pula, hasil dari tahap *Listen* kerap berkaitan langsung dengan tahap *Navigate*, terutama saat sekolah membutuhkan dukungan implementasi secara cepat. Adanya hubungan tidak langsung ini menandakan bahwa kebijakan Merdeka Belajar membutuhkan analisis yang fleksibel, sebab situasi di sekolah kerap berubah dengan cepat dan menuntut respons yang adaptif.

Lingkaran Umpan Balik (*Feedback Loop*)

Umpan balik berperan sebagai komponen utama dalam Model L-EARN. Panah melengkung dari tahap *Navigate* ke *Listen, Empathize, dan Analyze* menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan serta hasilnya memberikan data baru yang dapat digunakan untuk menyempurnakan analisis kebijakan pada putaran selanjutnya. Dalam konteks Merdeka Belajar, mekanisme umpan balik ini membantu sekolah dan pemangku kebijakan mengevaluasi keberhasilan intervensi, memperbaiki strategi berdasarkan temuan di lapangan, serta menyesuaikan metode pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa dan guru (Dewi et al., 2025). Oleh karena itu, kebijakan menjadi dinamis dan menciptakan sistem pembelajaran kebijakan yang terus berkembang, sebagaimana dijelaskan dalam

literatur tentang policy learning dan iterative governance.

Hubungan dengan Dimensi Framing

Dimensi Framing berperan sebagai pengikat yang menyatukan seluruh tahapan dalam Model L-EARN menjadi satu narasi kebijakan Merdeka Belajar. Melalui framing, analisis selalu diarahkan agar konsisten dengan nilai-nilai utama kebijakan, seperti kemandirian belajar, otonomi sekolah, pemerataan akses, dan peningkatan mutu pendidikan. Framing bukan hanya memberi pedoman normatif, namun juga memperkuat makna serta tujuan strategis kebijakan (Sari, 2020). Dalam hal ini, framing menjembatani antar tahap L-EARN sehingga jalannya analisis tetap sejalan dengan tujuan Merdeka Belajar (bridging), memperkuat pesan, nilai, dan implikasi kebijakan agar analisis dan rekomendasi lebih berdampak (amplifying), serta memfasilitasi adaptasi kebijakan terhadap perubahan sosial, perkembangan teknologi termasuk kecerdasan buatan, dan dinamika kebutuhan sekolah (transforming). Dengan begitu, framing menciptakan ruang interpretasi yang membuat Model L-EARN tidak hanya berjalan secara teknis, tetapi juga memperoleh legitimasi sosial dan relevansi nilai dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Makna Umum Hubungan Antar Elemen Model L-EARN

Secara umum, Model L-EARN memperlihatkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan sistem yang bersifat siklus, saling berinteraksi, dan mampu beradaptasi. Hubungan langsung antar tahap menandakan proses utama dalam analisis kebijakan, sedangkan hubungan tidak langsung menunjukkan fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan dinamika di lapangan. Adanya mekanisme umpan balik mendukung proses pembelajaran kebijakan secara terus-menerus, sementara dimensi framing memastikan nilai dan arah kebijakan tetap konsisten dengan prinsip Merdeka Belajar. Melalui interaksi antarelemen, Model L-EARN dapat memahami kompleksitas kebijakan Merdeka Belajar, menggabungkan kebutuhan di lapangan dengan analisis ilmiah, menghasilkan rekomendasi yang relevan, dan memandu implementasi kebijakan secara lebih optimal. Dengan demikian, model ini memberikan gambaran komprehensif, reflektif, dan berkelanjutan mengenai cara menganalisis dan menyempurnakan kebijakan pendidikan demi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Dengan demikian, Model L-EARN memfasilitasi analisis dan penerapan kebijakan Merdeka Belajar secara lebih interaktif dan tepat sasaran. Melalui tahapan *Listen, Empathize, Analyze, Recommend, dan Navigate*, model ini membantu mengidentifikasi kebutuhan sekolah, menganalisis permasalahan berbasis data, serta merumuskan dan mengawal rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dimensi framing memastikan seluruh proses tetap sejalan dengan nilai-nilai inti Merdeka Belajar, seperti kemandirian, kesetaraan, dan otonomi sekolah. Oleh sebab itu, Model L-EARN memberikan arah yang jelas serta berkelanjutan dalam mendukung upaya peningkatan kualitas pendidikan di satuan pendidikan.

Analisis kontekstual bertujuan untuk menilai relevansi dan efektivitas penerapan Model L-EARN dalam memahami dinamika kebijakan pendidikan di Indonesia, terutama kebijakan Merdeka

Belajar sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan. Kebijakan ini merupakan tonggak perubahan besar dalam transformasi pendidikan nasional, seperti penataan ulang kurikulum, penguatan otonomi sekolah, serta integrasi teknologi pembelajaran di lingkungan satuan pendidikan. Seperti yang disampaikan oleh (M. Stracke et al., 2025), perubahan tersebut mencerminkan pergeseran sistem pendidikan ke arah ekosistem pembelajaran yang lebih fleksibel, berfokus pada kompetensi, dan memanfaatkan teknologi demi peningkatan kualitas pembelajaran.

Keberhasilan penerapan Merdeka Belajar sangat bergantung pada kemampuan kebijakan untuk beradaptasi dengan keragaman konteks sosial, ekonomi, dan infrastruktur pendidikan di setiap daerah. Hal ini sejalan dengan pendapat (Pahlawanita Damayanti, 2025) yang menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sekolah agar transformasi pendidikan berlangsung secara efektif. Model L-EARN dapat dimanfaatkan untuk memahami kompleksitas tersebut melalui lima tahap yang saling terintegrasi dan berfokus pada pemahaman konteks. Dengan memanfaatkan Model L-EARN, pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar dapat dievaluasi melalui lima proses utama berikut:

Listen

Tahap ini menyoroti betapa pentingnya mengenali kebutuhan dan masalah yang sebenarnya dialami oleh satuan pendidikan. Dalam kerangka Merdeka Belajar, guru dan kepala sekolah harus memahami tingkat kesiapan sekolah dalam melaksanakan pembelajaran berbasis kompetensi, penggunaan teknologi, serta dukungan yang dibutuhkan dari pemerintah. Langkah mendengarkan ini menjadi dasar untuk memahami perbedaan kesiapan setiap sekolah.

Empathize

Tahap Empathize bertujuan memahami situasi sosial dan budaya di sekolah, seperti tantangan guru dalam menyesuaikan kurikulum, beban administratif, serta kondisi psikososial siswa. Pemahaman secara empatik sangat krusial agar kebijakan Merdeka Belajar tidak diterapkan secara top-down, melainkan disesuaikan dengan konteks masing-masing satuan pendidikan.

Analyze

Tahap analisis memberikan kesempatan untuk menilai secara lebih mendalam perbedaan antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan. Pada Merdeka Belajar, tahapan ini mencakup penilaian kesiapan teknologi, kemampuan guru, budaya sekolah, serta kesesuaian kurikulum. Analisis yang didasarkan pada bukti membantu sekolah mengenali faktor-faktor yang menjadi penghambat maupun pendukung peningkatan kualitas pembelajaran.

Recommend

Hasil analisis pada tahap ini memberikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Merdeka Belajar. Rekomendasi tersebut meliputi kebutuhan pelatihan bagi guru, perbaikan manajemen sekolah, penguatan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, serta tindakan afirmatif untuk sekolah dengan keterbatasan sumber daya.

Navigate

Tahap akhir dalam Model L–EARN menyoroti pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks Merdeka Belajar, sekolah perlu secara rutin melakukan monitoring, evaluasi, serta menyesuaikan strategi agar kebijakan tetap relevan dan mampu beradaptasi dengan dinamika lingkungan pendidikan. Pada tahap ini, sekolah dan pembuat kebijakan dapat menjalankan prinsip perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*). Berdasarkan analisis kontekstual, kebijakan Merdeka Belajar sangat sesuai dengan struktur konseptual Model L–EARN. Kebijakan tersebut menuntut adanya pendengaran yang mendalam terhadap kebutuhan sekolah, pemahaman secara empatik terhadap situasi di lapangan, analisis yang berbasis data, rekomendasi yang responsif, serta implementasi yang berkelanjutan. Selain itu, Merdeka Belajar juga menekankan pentingnya otonomi sekolah, kolaborasi lintas sektor, pemerataan akses pendidikan, dan proses pembelajaran kebijakan yang berkelanjutan—semuanya sejalan dengan karakter siklik dan iteratif Model L–EARN. Dengan demikian, Model L–EARN tidak hanya menawarkan kerangka analisis teoretis, tetapi juga berfungsi sebagai platform diagnostik praktis untuk menilai kesiapan, efektivitas, serta keberlanjutan implementasi kebijakan Merdeka Belajar dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Model L–EARN tentang Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar dalam Peningkatan Mutu Pendidikan SWOT digunakan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan Merdeka Belajar (Ramadhan & Megawati, 2022) melalui sudut pandang Model L–EARN (Listen, Empathize, Analyze, Recommend, Navigate). Evaluasi ini mengkaji kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman di setiap tahap L–EARN. Tujuannya yaitu menemukan faktor strategis penentu sukses transformasi pendidikan, terutama dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran, memperkuat otonomi sekolah, serta menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi pendidikan. Dengan pemetaan SWOT ini, dapat diketahui sejauh mana tahapan L–EARN berkontribusi terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar dan bagaimana upaya perbaikan kebijakan bisa terus dilakukan secara berkesinambungan. ini, dapat dipahami sejauh mana setiap tahap L–EARN memberikan kontribusi terhadap efektivitas implementasi kebijakan Merdeka Belajar serta bagaimana proses perbaikan kebijakan dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Tabel 3. Analisis SWOT Kebijakan Merdeka Belajar Berbasis Model L–EARN.

Tahap L–EARN	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
L - <i>Listen</i> (Identifikasi kebutuhan dan konteks satuan pendidikan)	Merdeka Belajar memberi keleluasaan sekolah menyesuaikan kebutuhan lokal. Asesmen Nasional menyediakan data untuk identifikasi masalah.	Tidak semua sekolah mampu mengolah data kebutuhan secara mandiri, sehingga kualitas pendataan berbeda-beda dan identifikasi masalah	Supervisi akademik diperkuat dengan data melalui platform digital Kemendikbud dan adanya forum berbagi antar sekolah.	Ketergantungan pada data pusat dapat mengabaikan kondisi lokal. Resistensi sekolah yang belum siap membuka masalah secara transparan.

E – <i>Empathize</i> (Pemahaman mendalam terhadap kondisi guru, siswa, dan sekolah)	Guru diberi otonomi dan Kurikulum Merdeka mendukung pembelajaran yang sesuai kebutuhan siswa.	Beban kerja tinggi menghambat observasi dan empati guru. Tidak semua guru terampil asesmen formatif dan memahami konteks psikososial siswa.	Pelatihan guru berbasis pembelajaran sosial-emosional dan coaching pendidikan. Program Guru Penggerak sebagai model kepemimpinan empatik.	Ketimpangan kompetensi guru dapat memperlebar kesenjangan kualitas pembelajaran antar sekolah.
A – <i>Analyze</i> (Analisis data, masalah, dan akar penyebab)	Tersedia panduan akar masalah (root cause analysis) dari Kemendikbud. Data AN, Rapor Pendidikan, dan PMP memperkuat analisis berbasis bukti.	Kemampuan Sekolah menganalisis data belum merata. Analisis masalah sering bersifat administratif, bukan instruksional.	Integrasi data pendidikan nasional mendukung analisis komprehensif. Kolaborasi dengan perguruan tinggi lewat PkM dan penelitian.	Risiko salah tafsir Data karena minimnya literasi data. Data tidak selalu <i>real-time</i> , menghambat pengambilan keputusan cepat.
R – <i>Recommend</i> (Perumusan strategi dan rekomendasi perbaikan mutu)	Merdeka Belajar memberi fleksibilitas strategi dan inovasi sekolah. Banyak praktik baik bisa direplikasi antar sekolah.	Rekomendasi kurang tepat karena analisis dangkal, dan sekolah minim pendampingan saat merancang peningkatan mutu	Sekolah Penggerak dan PDP bisa jadi rujukan strategi. Ada peluang integrasi rekomendasi dengan program digital dan teknologi pembelajaran.	Rekomendasi tidak dijalankan karena anggaran dan SDM terbatas. Ada risiko strategi jadi proyek jangka pendek tanpa keberlanjutan.
N – <i>Navigate</i> (Pendampingan, monitoring, dan evaluasi berkelanjutan)	Sistem monitoring digital tersedia (Rapor Pendidikan, Platform Merdeka Mengajar). Pemerintah menekankan prinsip perbaikan berkelanjutan.	Proses monitoring masih cenderung administratif. Belum semua sekolah memiliki budaya refleksi berkelanjutan.	Pengembangan dashboard evaluasi mutu sekolah berbasis AI. Pendampingan berkelanjutan dari fasilitator sekolah penggerak.	Risiko keamanan data. Resistensi terhadap evaluasi yang dianggap menambah beban pelaporan.

Sumber : Olah Data Peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 3, analisis SWOT mengindikasikan bahwa penerapan Kebijakan Merdeka Belajar secara normatif sudah sejalan dengan tahapan Model L–EARN, tetapi masih terdapat kendala dalam kesiapan sumber daya manusia, literasi data sekolah, dan kapasitas kepemimpinan pembelajaran. Regulasi memang telah memberikan arah kebijakan yang progresif, namun mekanisme penguatan implementasi di tingkat satuan pendidikan masih belum optimal. Dengan demikian, Model L–EARN menjadi kerangka diagnostik yang dapat mengidentifikasi kesenjangan implementasi dan membantu menavigasi kebijakan secara berkelanjutan.

Analisis SWOT mengungkapkan bahwa kebijakan Merdeka Belajar sangat selaras dengan

struktur Model L-EARN. Tahapan *Listen* dan *Empathize* menjadi dasar utama dalam memahami situasi sekolah, *Analyze* memperkuat keakuratan identifikasi masalah, *Recommend* menghasilkan strategi yang sesuai, dan *Navigate* memastikan implementasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Model L-EARN berperan tidak hanya sebagai kerangka analisis, tetapi juga sebagai alat diagnostik yang efektif dalam mendukung perbaikan mutu pendidikan di Indonesia secara adaptif dan berkesinambungan. Analisis SWOT dengan Model L-EARN bertujuan menilai implementasi kebijakan Merdeka Belajar di satuan pendidikan guna meningkatkan mutu pendidikan. Pendekatan ini, melalui lima tahap utama *Listen*, *Empathize*, *Analyze*, *Recommend*, dan *Navigate* mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang timbul selama proses penerapan kebijakan di sekolah.

Pada tahap *Listen*, keunggulan utama terletak pada kebijakan Merdeka Belajar yang memberikan kebebasan kepada sekolah untuk menentukan kebutuhan pembelajaran sesuai dengan konteks peserta didik. Akan tetapi, belum semua sekolah memiliki sistem pengumpulan data yang terstruktur, sehingga kebutuhan pembelajaran kerap diidentifikasi secara intuitif dan tidak berdasarkan bukti. Penguatan dapat dilakukan melalui asesmen diagnostik dan penggunaan Rapor Pendidikan, sedangkan tantangan muncul dari kurangnya kesiapan sekolah dalam menganalisis data secara akurat.

Tahap *Empathize* menunjukkan bahwa Merdeka Belajar mendorong para guru untuk lebih memahami kondisi, minat, dan kesiapan belajar siswa secara mendalam. Namun, masih banyak guru yang menggunakan pendekatan pembelajaran tradisional sehingga diferensiasi pembelajaran kurang diterapkan. Peluang untuk perbaikan dapat diwujudkan melalui pelatihan guru, pembentukan komunitas belajar, dan penguatan budaya refleksi dalam proses pembelajaran. Meski begitu, tantangan tetap ada berupa ketimpangan akses pelatihan di berbagai wilayah serta resistensi sejumlah pendidik terhadap perubahan cara kerja. Pada tahap *Analyze*, sekolah diharapkan mampu menelaah permasalahan pembelajaran, pencapaian hasil belajar, serta kesenjangan dalam pelaksanaan kebijakan. Keunggulan tahap ini terletak pada ketersediaan berbagai alat evaluasi dan indikator mutu dari pemerintah. Namun, sejumlah sekolah masih kekurangan kemampuan analisis, sehingga data yang ada sering tidak dimanfaatkan untuk peningkatan pembelajaran. Peluang untuk memperkuat proses ini dapat diperoleh melalui pendampingan pemerintah dan kemitraan dengan perguruan tinggi, sementara tantangan utamanya adalah beban administrasi yang dapat menghambat analisis secara mendalam.

Tahap *Recommend* memberikan kesempatan bagi satuan pendidikan untuk menyusun rekomendasi dan strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil analisis sebelumnya. Kelebihan dari tahap ini terletak pada fleksibilitas kebijakan Merdeka Belajar yang mendorong inovasi sekolah. Namun, kelemahannya adalah implementasi rekomendasi seringkali tidak konsisten akibat keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi internal. Terdapat peluang melalui dukungan program pemerintah, kemitraan dengan sekolah lain, serta penguatan peran kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran. Ancaman bisa muncul jika terjadi pergantian kepemimpinan atau perubahan kebijakan yang menggeser prioritas program sekolah.

Tahap terakhir, *Navigate*, mencakup pendampingan, supervisi, dan navigasi implementasi agar rencana peningkatan mutu dapat berjalan optimal. Kelebihan tahap ini terletak pada adanya supervisi akademik, komunitas belajar guru, serta fleksibilitas pengelolaan kurikulum. Namun, tantangan yang dihadapi adalah belum meratanya kualitas pendampingan di seluruh daerah. Peluang penguatan bisa diperoleh melalui pengembangan praktik baik antarsekolah, sementara ancamannya berasal dari ketimpangan sumber daya dan hambatan koordinasi antara sekolah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.

Secara umum, analisis SWOT yang menggunakan Model L-EARN mengindikasikan bahwa penerapan kebijakan Merdeka Belajar berpotensi besar meningkatkan kualitas pendidikan, meski masih terdapat hambatan terkait kapasitas, konsistensi pelaksanaan, dan kesetaraan mutu di berbagai wilayah. Model L-EARN menawarkan pendekatan menyeluruh yang membantu sekolah mengidentifikasi kebutuhan, memahami situasi, menganalisis informasi, merancang strategi, dan mengelola pelaksanaan kebijakan dengan cara yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Model ini berperan sebagai alat analisis yang memperkuat kajian atas berbagai isu implementasi di sekolah, serta memberikan langkah-langkah praktis yang bisa diadopsi oleh pembuat kebijakan, pemerintah daerah, kepala sekolah, maupun pemangku kepentingan pendidikan lainnya. Rekomendasi ini menjadi pedoman agar prinsip-prinsip Merdeka Belajar dapat diterapkan secara konsisten, adaptif, dan berkelanjutan demi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Tabel 4. Rekomendasi Strategis untuk Mengoptimalkan Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Berdasarkan Dimensi Model L-EARN

Dimensi (Model L-EARN)	Rekomendasi Utama
L – Leadership (Kepemimpinan Pembelajaran)	Kepala sekolah diperkuat sebagai pemimpin pembelajaran melalui supervisi, coaching, dan refleksi. Insentif diberikan berdasarkan peningkatan mutu, seperti Rapor Pendidikan dan proyek P5. Pelatihan kepemimpinan berkelanjutan difokuskan pada pengelolaan pembelajaran, KOSP, dan inovasi
E – Engagement (Kolaborasi & Keterlibatan Multi-Aktor)	Membangun kemitraan strategis antara sekolah, pemerintah, kampus, dunia usaha, dan komunitas untuk mendukung Merdeka Belajar. Mengembangkan platform berbagi praktik baik antarsekolah, seperti forum KKG/MGMP dan lokakarya. Meningkatkan peran orang tua melalui komunikasi, program parenting, dan keterlibatan di sekolah.
A - Adaptation & Equity (Adaptasi Kebijakan & Pemerataan Akses)	Menyusun KOSP sesuai kebutuhan siswa, karakter sekolah, dan potensi lokal. Memaksimalkan dukungan untuk sekolah di wilayah 3T, termasuk fasilitas, pelatihan, dan pendampingan. Menjamin kesetaraan dengan layanan pembelajaran inklusif bagi semua siswa.

R – Reflection (Pembelajaran Berkelanjutan & Perbaikan Mutu)	Mendorong sekolah memanfaatkan Rapor Pendidikan untuk perencanaan berbasis data secara rutin. Melakukan refleksi, evaluasi, dan monitoring mutu tiap semester. Mendokumentasikan praktik baik untuk pembelajaran antar sekolah.
N – Framing (Narasi, Nilai, dan Komunikasi Kebijakan)	Memperkuat narasi Merdeka Belajar lewat komunikasi publik yang inklusif dan mudah dipahami. Membuat pedoman budaya sekolah yang menekankan otonomi, partisipasi, dan pembelajaran bermakna. Menyebarkan cerita sukses Merdeka Belajar untuk meningkatkan dukungan publik.

Sumber : Olah Data Peneliti, 2026

Agar pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar dapat berjalan secara terukur, akuntabel, dan berkelanjutan, dibutuhkan indikator-indikator yang dapat merepresentasikan kinerja di setiap dimensi Model L–EARN. Tabel 5 menyajikan indikator utama beserta mekanisme tata kelola implementasi yang diadaptasi dari kerangka L–EARN, sehingga dapat dijadikan acuan evaluasi oleh sekolah, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya. Tabel tersebut menjadi panduan dalam memantau efektivitas program, konsistensi antar satuan pendidikan, serta mengarahkan penguatan upaya peningkatan mutu pendidikan sesuai prinsip Merdeka Belajar.

Tabel 5. Indikator Kinerja dan Tata Kelola Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Berdasarkan Dimensi Model L–EARN :

Dimensi (Model L–EARN)	Indikator Kinerja Utama	Mekanisme Tata Kelola
L–Leadership (Kepemimpinan Pembelajaran)	Persentase kepala sekolah dan guru yang mengikuti pelatihan supervisi dan manajemen pembelajaran. Frekuensi supervisi, coaching, dan refleksi guru. Indeks budaya data sekolah, seperti pemanfaatan Rapor Pendidikan untuk perencanaan berbasis data	Program pelatihan kepemimpinan berjenjang di daerah. Pembinaan oleh pengawas dan fasilitator berpengalaman. Integrasi supervisi akademik berbasis data dalam manajemen sekolah.
E–Engagement (Kolaborasi Keterlibatan Pemangku Kepentingan)	Jumlah kemitraan sekolah dengan pemerintah, dunia usaha, kampus, dan komunitas pendidikan. Ketersediaan modul kolaborasi dan praktik baik yang terbuka untuk publik. Tingkat partisipasi orang tua di kegiatan sekolah.	Forum kolaborasi lintas sektor seperti KKG/MGMP dan Forum Komunitas Belajar. Nota kesepahaman berbasis output. Mekanisme komunikasi antara sekolah dan orang tua.
A–Adaptation & Equity (Adaptasi Kebijakan & Kesetaraan Akses)	Rasio ketersediaan sarana belajar seperti buku dan fasilitas. Partisipasi sekolah 3T dalam program Merdeka Belajar. Indeks kesetaraan layanan pendidikan (akses, kualitas, keterjangkauan).	Program afirmasi untuk sekolah tertinggal, seperti pendampingan dan bantuan sarana. Audit kesetaraan layanan pendidikan daerah. Penguatan manajemen berbasis sekolah sesuai konteks lokal.

R-Reflection (Evaluasi & Pembelajaran Berkelanjutan)	Frekuensi evaluasi program sekolah menggunakan Rapor Pendidikan. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi tiap semester. Pemanfaatan praktik baik antar sekolah sebagai acuan peningkatan mutu.	Dasbor monitoring sekolah di tingkat dinas atau daerah. Komite mutu sekolah untuk refleksi rutin. Mekanisme umpan balik antara sekolah dan pemerintah daerah.
N-Framing (Narasi, Nilai dan Komunikasi Kebijakan)	Tingkat pemahaman publik tentang Merdeka Belajar. Jangkauan komunikasi kebijakan melalui media sekolah dan pemerintah daerah. Jumlah dokumentasi cerita sukses implementasi Merdeka Belajar.	Unit komunikasi kebijakan di sekolah dan dinas pendidikan. Pedoman naratif Merdeka Belajar yang konsisten. Kampanye literasi pendidikan untuk guru, orang tua

Sumber : Olah Data Peneliti, 2026

Model L-EARN berperan sebagai kerangka analisis yang menyeluruh untuk memahami pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Tidak seperti beberapa model implementasi kebijakan lain yang fokus pada faktor-faktor struktural, Model L-EARN menitikberatkan pada proses pembelajaran kebijakan yang berlangsung secara berulang melalui tahapan mendengarkan konteks (*listen*), memahami empati para pemangku kepentingan (*empathize*), menganalisis akar masalah (*analyze*), merumuskan rekomendasi berbasis bukti (*recommend*), serta menavigasi tindak lanjut implementasi secara berkelanjutan (*navigate*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan utama dalam penerapan Merdeka Belajar meliputi kurangnya mekanisme mendengarkan konteks di satuan pendidikan, terbatasnya pemahaman guru tentang pembelajaran berdiferensiasi, perbedaan kualitas data sekolah, dan adanya kesenjangan antara kebijakan nasional dengan kapasitas sekolah.

Penggunaan Model L-EARN dalam analisis kebijakan menunjukkan bahwa regulasi Merdeka Belajar yang tercantum dalam Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 belum sepenuhnya didukung oleh analisis kesiapan implementasi di tingkat sekolah. Regulasi ini lebih memfokuskan pada tujuan dan arah kebijakan, sedangkan aspek kesiapan sumber daya manusia, kemampuan literasi data, dan kapasitas kepemimpinan sekolah belum menjadi perhatian utama dalam penyusunan kebijakan. Model L-EARN berperan dalam mengisi kekosongan ini dengan menyediakan kerangka analisis implementasi yang mengaitkan regulasi, konteks sekolah, dan praktik pembelajaran. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa kegagalan kebijakan pendidikan kerap disebabkan bukan oleh rancangan kebijakannya, melainkan oleh lemahnya diagnosis kebutuhan, kurangnya empati dalam kebijakan, serta minimnya proses analisis yang menghubungkan visi kebijakan dengan kondisi nyata di lapangan.

Tahap Listen pada Model L-EARN menunjukkan bahwa keberhasilan Merdeka Belajar sangat bergantung pada kemampuan sekolah dalam memahami konteks melalui data asesmen, refleksi guru, dan analisis lingkungan belajar. Jika sekolah belum memiliki budaya literasi data yang kuat, proses

implementasi cenderung menjadi sekadar administratif. Pada tahap *Empathize*, ditekankan pentingnya memahami sudut pandang guru dan siswa sebagai aktor utama perubahan. Seperti yang dinyatakan oleh (Oo et al., 2025) kebijakan pendidikan hanya efektif jika para pemangku kepentingan utama merasakan dukungan emosional dan profesional. Dalam Merdeka Belajar, guru membutuhkan ruang untuk merefleksikan kebutuhan peserta didik serta dukungan menghadapi perubahan praktik pembelajaran.

Tahap *Analyze* dalam Model L-EARN memiliki peran krusial untuk menemukan perbedaan antara tujuan kebijakan dan pelaksanaan di lapangan. Melalui analisis berbasis bukti, sekolah dapat mengidentifikasi sumber utama masalah mutu, seperti tingkat literasi yang rendah, ketimpangan sarana, atau distribusi numerasi yang tidak merata. Sesuai pendapat (Umami & Wahyudi, 2025) proses analisis yang baik membantu sekolah menyesuaikan strategi dengan kebutuhan nyata di lapangan. Pada tahap ini, kebijakan Merdeka Belajar dipahami sebagai cara mengaitkan data dengan peningkatan pembelajaran, bukan hanya sekadar memenuhi dokumen formal. Tahap *Recommend* menegaskan pentingnya peran sekolah dalam menyusun strategi peningkatan mutu yang relevan dengan konteks, terukur, dan didasarkan pada data. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sekolah yang sukses menerapkan Merdeka Belajar cenderung merumuskan rekomendasi dengan mengedepankan kebutuhan belajar, bukan hanya sekadar memenuhi indikator administratif. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Dwiyono et al., 2022) yang menyoroti esensi kepemimpinan instruksional untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang selaras dengan kemampuan guru dan situasi peserta didik.

Tahap *Navigate* adalah kontribusi utama Model L-EARN karena memastikan kebijakan tidak berhenti pada tahap perumusan, melainkan berlanjut ke proses implementasi, pemantauan, refleksi, dan perbaikan berkelanjutan. Proses navigasi kebijakan dilakukan melalui supervisi akademik, pemanfaatan Rapor Pendidikan, forum komunitas belajar guru, dan pendampingan implementasi kurikulum. (Muha & Silitonga, 2025) menegaskan bahwa sistem kebijakan yang mampu melakukan navigasi perubahan secara berkelanjutan akan lebih siap menghadapi ketidakpastian serta menjaga relevansi program pendidikan.

L-EARN juga menyoroti pentingnya pembingkai kebijakan. Framing kebijakan Merdeka Belajar perlu diubah dari sekadar dianggap sebagai “program baru” menjadi “kerangka peningkatan mutu yang memberi otonomi kepada guru dan sekolah”. Pembingkai yang tepat akan memperkuat legitimasi kebijakan serta meningkatkan dukungan para pemangku kepentingan. Pandangan ini sejalan dengan (Taeihagh, 2025) yang menegaskan bahwa framing merupakan instrumen krusial dalam pelaksanaan kebijakan berbasis perubahan sosial.

Model L-EARN menawarkan sudut pandang baru bahwa implementasi kebijakan pendidikan tidak semata-mata ditentukan oleh aturan atau ketersediaan sumber daya, melainkan oleh kemampuan sistem untuk belajar dari data, menyesuaikan diri dengan konteks, membangun empati, memperkuat rekomendasi berbasis bukti, serta menavigasi perubahan secara berkesinambungan. Kerangka ini memberikan sumbangan teoritis bagi penguatan konsep pembelajaran kebijakan (policy learning) dan

implementasi Merdeka Belajar di Indonesia. Selain itu, model ini turut mengisi kekosongan dalam analisis implementasi kebijakan pendidikan yang selama ini kurang menyoroti pentingnya refleksi, empati dalam kebijakan, serta navigasi berkelanjutan tiga aspek yang terbukti menjadi kunci keberhasilan peningkatan mutu pendidikan.

PEMBAHASAN

Kebijakan pendidikan di sekolah sangat bergantung pada kemampuan kepala sekolah dalam memimpin perubahan organisasi serta proses belajar-mengajar. Berbagai studi internasional menegaskan bahwa kepala sekolah memegang peran sentral dalam merumuskan kebijakan di sekolah dan memastikan agar kebijakan tersebut diterapkan secara optimal dalam kegiatan pembelajaran. Menurut (Perez et al., 2025) kepala sekolah yang mampu mengelola data pendidikan secara sistematis dapat meningkatkan mutu pengambilan keputusan dan memberikan pengaruh positif terhadap prestasi siswa.

(Leithwood et al., 2020) juga menyatakan bahwa peran kepala sekolah adalah faktor utama kedua yang memengaruhi mutu pembelajaran, setelah kualitas pengajaran di kelas. Hal serupa disampaikan oleh (Waruwu et al., 2025) yang menyoroti pentingnya peran kepemimpinan instruksional kepala sekolah dalam mendukung pengembangan profesionalisme guru. Selain itu, riset (Hapsara et al., 2025) menunjukkan bahwa kepala sekolah yang efektif dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendorong peningkatan kemampuan guru secara berkelanjutan. Sementara itu, penelitian (Nguyen & Welch, 2026) menemukan bahwa kepala sekolah yang memberikan kebebasan profesional kepada guru dapat meningkatkan motivasi, loyalitas, dan keberlanjutan pengembangan profesi mereka.

Di samping faktor kepemimpinan, mutu pendidikan juga sangat ditentukan oleh kemampuan lembaga pendidikan dalam mengelola data sebagai landasan pengambilan keputusan. Studi (Grabarek & Kallemeyn, 2020) mengungkapkan bahwa pemanfaatan data akademik oleh guru dapat membantu mengenali kebutuhan siswa dan menyusun strategi pembelajaran yang lebih sesuai. Hal ini diperkuat oleh riset (Mandinach & Schildkamp, 2021) yang menekankan pentingnya pemahaman yang benar dalam menggunakan data pendidikan agar terhindar dari kesalahan interpretasi saat mengambil keputusan di sekolah. Selain itu, riset (Mandinach & Gummer, 2016) menegaskan bahwa literasi data adalah kompetensi yang harus dimiliki guru untuk dapat memanfaatkan informasi pendidikan secara optimal dalam kegiatan pembelajaran. Dalam kaitannya dengan pengembangan sekolah, Studi yang dilakukan oleh (Wayman et al., 2017) mengindikasikan bahwa penggunaan data hasil survei guru dapat berfungsi sebagai alat utama dalam menyusun program peningkatan kualitas sekolah secara terstruktur. Temuan serupa disampaikan oleh (Nur Efendi & Muh Ibnu Sholeh, 2023) yang menegaskan bahwa pemantauan perkembangan belajar siswa secara langsung dapat membantu pemimpin sekolah untuk merancang strategi penguatan mutu pembelajaran dengan respons yang cepat dan berkesinambungan.

Selain faktor kepemimpinan sekolah dan pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan, keberadaan komunitas pembelajaran profesional juga berperan penting dalam meningkatkan mutu

pendidikan, terutama dalam mendorong terjadinya kolaborasi antar guru. Berbagai studi mengungkapkan bahwa jaringan pembelajaran profesional dapat memperluas peluang guru untuk saling bertukar pengetahuan, melakukan refleksi pembelajaran, serta memperbaiki praktik pengajaran di kelas. Selanjutnya menurut (Prenger et al., 2019) menemukan bahwa komunitas pembelajaran profesional yang terstruktur secara sistematis mampu memperkuat kapasitas kolektif guru dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif. (Aisah et al., 2024) juga menegaskan bahwa keberlangsungan komunitas belajar profesional sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan sekolah yang menanamkan budaya kolaboratif dan semangat belajar bersama. (Ningrum et al., 2025) menyoroti pentingnya penguatan modal profesional guru melalui kolaborasi dan pembelajaran kolektif sebagai strategi utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara berkesinambungan. Sejalan dengan temuan tersebut, penelitian lain menyebutkan bahwa distribusi kepemimpinan di sekolah dapat meningkatkan otonomi dan pemberdayaan guru dalam proses pembelajaran.

Kepemimpinan transformasional merupakan salah satu aspek krusial dalam meningkatkan performa guru dan efektivitas organisasi sekolah. Model kepemimpinan ini mendorong terbentuknya visi bersama, memperkuat motivasi kerja pendidik, serta menumbuhkan komitmen kolektif untuk meraih tujuan pendidikan. Studi (Bellibas et al., 2025) menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional kepala sekolah dapat menurunkan tingkat kelelahan guru dengan memberikan dukungan organisasi yang solid serta memperkuat ketahanan profesional. Hasil serupa ditemukan pada penelitian (Putu Ayu Novita & Yohana F. Cahya Palupi Meilani, 2025), yang menyimpulkan bahwa kepemimpinan transformasional mampu meningkatkan perilaku kewargaan guru melalui dorongan motivasi berprestasi. Selain itu, riset (Alwani et al., 2021) memperlihatkan bahwa budaya sekolah yang positif dan kepemimpinan instruksional kepala sekolah turut berperan signifikan dalam meningkatkan kinerja guru. Penelitian (Slamet Riyadi, 2025) menegaskan bahwa kepemimpinan transformasional dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pengembangan profesionalisme guru. Selanjutnya, penelitian (Restu Rahayu & Sofyan Iskandar, 2023) juga membuktikan bahwa kepemimpinan transformasional berkontribusi dalam mendorong kreativitas dan produktivitas guru selama proses pembelajaran.

Kemajuan teknologi digital turut membawa dampak besar terhadap perubahan sistem pendidikan, khususnya dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan memperluas akses ke sumber-sumber belajar. Penerapan teknologi dalam dunia pendidikan tak sekadar penggunaan perangkat digital, namun juga mencakup perubahan pola pikir dalam pembelajaran yang lebih luwes, kolaboratif, serta berbasis teknologi. (Sosa-Díaz et al., 2022) menemukan bahwa keberhasilan integrasi teknologi pendidikan di sekolah sangat dipengaruhi oleh kesiapan guru, peran kepemimpinan sekolah, serta kebijakan pendidikan yang mampu menyesuaikan perkembangan teknologi. Integrasi teknologi dalam kurikulum dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan memperbanyak kesempatan siswa untuk mengakses ragam sumber belajar digital. Selanjutnya, (Latifah Ely Ma'ruf & Nur Rahmi Sonia, 2025) menegaskan bahwa peningkatan kemampuan digital guru menjadi faktor utama dalam mendukung perubahan pembelajaran di era digital. Kerangka kompetensi digital guru juga dipaparkan dalam penelitian (Finny Anita & Kurniawati, 2025)

yang menyoroti pentingnya penguatan keterampilan digital bagi pendidik dalam merancang pembelajaran inovatif berbasis teknologi. Sementara itu, (Martin et al., 2024) mengungkapkan bahwa transformasi digital pada berbagai sektor, termasuk pendidikan, memerlukan dukungan infrastruktur teknologi yang memadai serta strategi organisasi yang adaptif terhadap dinamika lingkungan digital.

Pengembangan profesional guru menjadi kunci dalam peningkatan mutu pendidikan dan keberhasilan pelaksanaan berbagai kebijakan pendidikan. Guru diharapkan tak hanya memiliki kompetensi pedagogik yang baik, namun juga mampu beradaptasi dengan perubahan kurikulum, kemajuan teknologi, serta kebutuhan belajar siswa yang terus berkembang. (Munawir & Muhidin, 2025) mengungkapkan bahwa perubahan dalam konteks pendidikan global menuntut sistem pendidikan guru yang lebih adaptif dan sanggup membekali calon guru dengan kompetensi profesional yang sesuai tuntutan abad ke-21. (Berg et al., 2023) juga menegaskan perlunya program pendidikan guru yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan sosial serta tantangan pendidikan global. Selanjutnya, riset (Nyaaba et al., 2026) menyatakan bahwa kepemimpinan instruksional maupun terdistribusi dapat memberikan dukungan penting bagi pengembangan profesional guru dalam menghadapi keberagaman kebutuhan belajar siswa. (Jumrawati & Lina, 2025) juga menyoroti bahwa praktik pendidikan berbasis bukti sangat bergantung pada kapasitas profesional guru dalam memahami dan mengaplikasikan hasil riset pendidikan ke dalam proses pembelajaran. Selain itu, (Lepcha et al., 2025) menegaskan bahwa pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dapat memperkuat pengembangan profesional guru melalui peningkatan partisipasi, akuntabilitas, dan kolaborasi dalam pengelolaan pendidikan di tingkat sekolah.

Krisis global seperti pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap sistem pendidikan di banyak negara, sehingga menuntut penyesuaian yang cepat dalam kegiatan belajar-mengajar maupun tata kelola sekolah. (Harris & Jones, 2020) menegaskan bahwa kepemimpinan sekolah yang mampu beradaptasi dan responsif menjadi faktor kunci dalam menjaga kelangsungan pembelajaran selama masa krisis. Selain itu, (Wati & Nurhasannah, 2024) menunjukkan bahwa pandemi memengaruhi kondisi psikologis guru sekaligus mendorong perubahan pada keterampilan profesional mereka, terutama terkait penggunaan teknologi pembelajaran digital. Hal ini juga diperkuat oleh (Ozamiz-Etxebarria et al., 2021) yang mengungkapkan bahwa guru menghadapi berbagai tantangan emosional dan profesional ketika menjalani transisi dari sistem pembelajaran daring kembali ke pembelajaran tatap muka.

Pelaksanaan kebijakan pendidikan yang berhasil membutuhkan dukungan sistem pengambilan keputusan berbasis data serta pemahaman mendalam mengenai konteks kebijakan pendidikan itu sendiri. (Spillane et al., 2002) menyoroti bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh cara aktor pendidikan memahami dan menafsirkan kebijakan dalam praktik sehari-hari. Selain itu, (Dunlop & Radaelli, 2018) menunjukkan bahwa proses pembelajaran kebijakan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan pendidikan di beragam konteks. Dalam praktiknya, pengambilan keputusan berbasis data juga dianggap sebagai pendekatan strategis untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. (Indriyanti et al., 2024) menemukan bahwa penggunaan data secara sistematis oleh kepala sekolah dapat memberikan dampak besar terhadap peningkatan prestasi siswa. Sementara itu,

pemanfaatan data oleh guru turut membantu meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar dan hasil belajar. Pemantauan perkembangan siswa secara real-time pun memungkinkan pimpinan sekolah membuat keputusan yang lebih akurat guna memperbaiki kualitas pembelajaran.

Peningkatan kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh tata kelola sekolah yang baik, termasuk pelaksanaan otonomi sekolah dan kepemimpinan yang kuat dari kepala sekolah. Otonomi sekolah memberikan keleluasaan bagi setiap institusi untuk mengatur sumber daya, kurikulum, serta metode pembelajaran sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik. (Robinson et al., 2008) menemukan bahwa otonomi sekolah yang disertai akuntabilitas tinggi dapat membawa peningkatan kinerja sekolah dan prestasi belajar siswa secara signifikan. Kepemimpinan sekolah yang efektif juga menjadi salah satu faktor utama dalam mendorong peningkatan mutu pembelajaran dan kinerja guru. Temuan ini diperkuat oleh (Hatimah et al., 2025) yang menunjukkan bahwa kepemimpinan instruksional kepala sekolah berpengaruh positif terhadap pengembangan profesional guru dan mutu pembelajaran. Kepala sekolah berperan sentral dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pertumbuhan profesional guru. Selain itu, kepemimpinan yang terdistribusi dapat menambah otonomi dan pemberdayaan guru, yang pada akhirnya turut meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah.

Peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah sangat dipengaruhi oleh adanya komunitas belajar profesional dan kemampuan guru dalam memanfaatkan data serta teknologi dalam proses belajar-mengajar. Jaringan profesional ini memungkinkan para guru untuk saling bertukar praktik terbaik, mengembangkan kompetensi pedagogik, dan mendorong inovasi pembelajaran yang berkesinambungan di lingkungan sekolah. (Head & Alford, 2015) juga menemukan bahwa komunitas belajar profesional yang terorganisasi dapat memperkuat kolaborasi antar guru dan meningkatkan kapasitas sekolah untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus. Dalam hal peningkatan mutu pengambilan keputusan pendidikan, (Ni Ketut Erna Muliastri, 2025) menegaskan pentingnya literasi data bagi guru agar informasi akademik siswa bisa dijadikan landasan dalam menyusun strategi pembelajaran yang efektif. Sementara itu, (Ratnawati & Lestari, 2025) membuktikan bahwa integrasi teknologi pendidikan secara sistematis mampu mendorong inovasi pembelajaran dan meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar di era digital.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar dalam meningkatkan mutu pendidikan sangat bergantung pada kualitas proses pembelajaran kebijakan yang dijalankan oleh sekolah, pemerintah, dan pemangku kepentingan. Hasil penelitian ini memperkenalkan Model L-EARN sebagai kerangka analisis berbasis proses yang menyoroti pentingnya memahami konteks pendidikan (*listen*), membangun empati kebijakan (*empathize*), melakukan analisis bukti (*analyze*), menyusun rekomendasi yang relevan (*recommend*), serta menjalankan implementasi kebijakan secara berkelanjutan (*navigate*). Model ini menekankan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh desain regulasi, tetapi juga kemampuan sistem pendidikan untuk belajar bersama melalui

pemanfaatan data, refleksi, dan adaptasi secara terus-menerus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap *listen* yang optimal membantu sekolah mengenali kebutuhan belajar murid serta tantangan struktural secara lebih tepat. Tahap *empathize* menekankan perlunya menempatkan guru dan siswa sebagai inti perubahan, sehingga pelaksanaan kebijakan tidak sekadar formalitas administratif, tetapi benar-benar berfokus pada kebutuhan riil pembelajaran. Pada tahap *analyze*, pentingnya kerangka analisis berbasis data di sekolah dapat membantu mengurangi jarak antara sasaran kebijakan dan praktik di lapangan. Selanjutnya, tahap *recommend* berperan dalam membantu sekolah merumuskan strategi perbaikan mutu yang lebih sesuai konteks, realistis, dan terukur.

Tahap *navigate* memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan implementasi melalui supervisi akademik, pemberian umpan balik yang konsisten, keterlibatan komunitas guru, serta pemanfaatan Rapor Pendidikan untuk memantau kemajuan mutu secara objektif. Model L-EARN juga menyoroti bahwa *framing* atau *pebingkai* merupakan unsur kunci dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar. Dengan *membangkai* kebijakan sebagai proses peningkatan mutu yang menghadirkan otonomi dan ruang kreativitas bagi sekolah, bukan sekadar urusan administratif, maka dukungan publik, legitimasi sosial, dan penerimaan dari guru dapat meningkat secara signifikan. *Pembangkai* yang tepat sangat membantu dalam menyelaraskan tujuan kebijakan nasional dengan kondisi lokal tanpa kehilangan inti dari transformasi pembelajaran.

Secara umum, Model L-EARN memperlihatkan bahwa upaya peningkatan mutu pendidikan memerlukan proses pembelajaran kebijakan yang terstruktur, melibatkan partisipasi berbagai pihak, dan bersifat berkelanjutan. Model ini menegaskan bahwa kesuksesan Merdeka Belajar sangat dipengaruhi oleh kemampuan sekolah dalam memahami konteks, mengelola perubahan, memanfaatkan data secara optimal, serta menavigasi tantangan implementasi di tengah keragaman kondisi sosial, geografis, dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, Model L-EARN bisa dimanfaatkan sebagai alat untuk mendiagnosis kesiapan satuan pendidikan, menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan, serta meninjau konsistensi upaya peningkatan mutu pada setiap jenjang. Selain itu, kerangka L-EARN juga dapat dijadikan acuan strategis nasional guna memperkuat sistem tata kelola mutu pendidikan. Kerangka ini membantu pemerintah, dinas pendidikan, dan sekolah memastikan bahwa implementasi Merdeka Belajar benar-benar membawa dampak pada peningkatan mutu pembelajaran, relevansi kurikulum, dan pemerataan hasil belajar siswa di seluruh Indonesia

SARAN

Berdasarkan hasil telaah, direkomendasikan agar pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar tidak hanya difokuskan pada kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga pada penguatan proses pembelajaran kebijakan di tingkat sekolah. Pemerintah dan pemangku kepentingan pendidikan perlu lebih menitikberatkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya kompetensi guru dan kepemimpinan kepala sekolah, supaya transformasi pembelajaran dapat berjalan secara berkelanjutan. Selain itu, pemanfaatan data pendidikan dari Asesmen Nasional dan Rapor Pendidikan sebaiknya

dioptimalkan sebagai dasar pengambilan keputusan di sekolah. Bagi peneliti berikutnya, disarankan untuk melakukan penelitian empiris dengan menguji penerapan Model L-EARN secara langsung di satuan pendidikan untuk memperkuat validitas hasil dan memperdalam pemahaman mengenai dinamika pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar dalam konteks yang lebih spesifik. Sekadar program administratif, maka dukungan publik, legitimasi sosial, dan penerimaan guru dapat meningkat secara signifikan. Peningkatan yang tepat membantu menyelaraskan tujuan kebijakan nasional dengan konteks lokal tanpa menghilangkan esensi transformasi pembelajaran.

DAFTAR RUJUKAN

- Aisah, A., Maufur, M., & Basukiyatno, B. (2024). Implementasi Komunitas Praktisi dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Bersertifikat Pendidik. *Journal of Education Research*, 5(3), 3072–3082. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i3.1417>
- Alwani, D. R., Isfianadewi, D., & Priyono, A. (2021). Implementation of Dynamic Capability and Sustainable Business Model in the Fashion Industry during the COVID-19 Pandemic - Case Study: Sialwa Indonesia. *International Journal of New Technology and Research*, 7(4). <https://doi.org/10.31871/IJNTR.7.4.12>
- Arar, K., Zohri, A.-A., Zohri, A.-A., Alhouthi, I., Chaaban, Y., Sawalhi, R., & Salha, S. (2024). A critical analysis of education policy in turbulent times: A comparative study. *Power and Education*, 16(2), 117–138. <https://doi.org/10.1177/17577438231168965>
- Badar, S., & Hidayat, A. (2023). Pemetaan Wilayah Kajian Kelompok Riset Pendidikan dan Dakwah: Analisis Tematik di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. *MENDIDIK: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pengajaran*, 9(2), 299–311. <https://doi.org/10.30653/003.202392.363>
- Barlian, U. C., Yuni, A. S., Ramadhanty, R. R., & Suhaeni, Y. (2023). Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi dalam Kurikulum Merdeka pada Mata Pelajaran Bahasa Inggris. *ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1(8), 815–822. <https://doi.org/10.55681/armada.v1i8.742>
- Bellibas, M. S., Ozkul, R., Karacabey, M. F., & Polatcan, M. (2025). Distributed leadership strengthening the role of transformational leadership in enhancing teacher psychological capital and well-being. *Journal of Educational Administration*, 63(6), 505–519. <https://doi.org/10.1108/JEA-02-2025-0062>
- Berg, K. M., Bray, J. E., Ng, K.-C., Liley, H. G., Greif, R., Carlson, J. N., Morley, P. T., Drennan, I. R., Smyth, M., Scholefield, B. R., Weiner, G. M., Cheng, A., Djärv, T., Abelairas-Gómez, C., Acworth, J., Andersen, L. W., Atkins, D. L., Berry, D. C., Bhanji, F., ... Yamada, N. K. (2023). 2023 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations: Summary From the Basic Life Support; Advanced Life Support; Pediatric Life Support; Neonatal Life Support; Education, Implementation, and Teams; and First Aid Task Forces. *Circulation*, 148(24). <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000001179>
- Dewi, N. F., D, H., & Damanik, R. (2025). Supervisi Pendidikan Sebagai Ruang Belajar Bersama: Studi Kasus Sekolah Berbasis Kurikulum Merdeka di SMP Swasta Melati Binjai. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(11), 3181–3191. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i11.4865>
- Dunlop, C. A., & Radaelli, C. M. (2018). The lessons of policy learning: Types, triggers, hindrances and pathologies. *Policy & Politics*, 46(2), 255–272. <https://doi.org/10.1332/030557318X15230059735521>
- Dwiyono, Y., Warman, W., Kurniawan, D., Atmaja, A. A. B. S., & Lorensius, L. (2022). Kepemimpinan Instruksional Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran. *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme*, 4(3), 319–334. <https://doi.org/10.37680/scaffolding.v4i3.2107>
- Finny Anita, & Kurniawati, T. (2025). Desain Pembelajaran Berbasis Proyek sebagai Strategi Penguatan Berpikir Kritis di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Bahasa*, 14(1), 1–12. <https://doi.org/10.31571/bahasa.v14i1.8951>
- Ghamrawi, N. (2023). Toward agenda 2030 in education: Policies and practices for effective school leadership. *Educational Research for Policy and Practice*, 22(2), 325–347.

- <https://doi.org/10.1007/s10671-023-09341-8>
- Grabarek, J., & Kallemeyn, L. M. (2020). Does Teacher Data Use Lead to Improved Student Achievement? A Review of the Empirical Evidence. *Teachers College Record: The Voice of Scholarship in Education*, 122(12), 1–42. <https://doi.org/10.1177/016146812012201201>
- Hapsara, A. S., Adams, C., Lubi, M. V. T., Nguyen, N. T.-C., Muti'ah, S., Visal, T., Liew, F. B., Hayeekhade, A.-A., Xaiyalath, C., & Nakashima, Y. (2025). Advancing Sustainable Development Goals through Character Education and Social Studies in Japanese Schools. *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru*, 10(1), 735–745. <https://doi.org/10.51169/ideguru.v10i1.1736>
- Harris, A., & Jones, M. (2020). COVID 19 – school leadership in disruptive times. *School Leadership & Management*, 40(4), 243–247. <https://doi.org/10.1080/13632434.2020.1811479>
- Hatimah, K., Magfiroh, S., Ibtisamah, A., Herka, H., Cinantya, C., & Aslamiah, A. (2025). Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran. *Jurnal Cahaya Edukasi*, 2(3), 76–85. <https://doi.org/10.63863/jce.v3i3.95>
- Head, B. W., & Alford, J. (2015). Wicked Problems: Implications for Public Policy and Management. *Administration & Society*, 47(6), 711–739. <https://doi.org/10.1177/0095399713481601>
- Holst, J., Brock, A., Grund, J., Schlieszus, A.-K., & Singer-Brodowski, M. (2025). Whole-school sustainability at the core of quality education: Wished for by principals but requiring collective and structural action. *Journal of Cleaner Production*, 519, 145897. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2025.145897>
- Indriyanti, L., Metta Caroline Setiadi, Ni Wayan Setiyawati Astin Bakti, Ahmad Suriansyah, & Celia Cinantya. (2024). Pentingnya Peran Kepala Sekolah dan Guru Dalam Meningkatkan Prestasi Siswa di Sekolah Dasar. *Journal Educational Research and Development | E-ISSN : 3063-9158*, 1(2), 273–283. <https://doi.org/10.62379/jerd.v1i2.149>
- Jumrawati, J., & Lina, K. (2025). Tinjauan Kompetensi Profesional Guru Bersertifikat Pendidik Terhadap Efektivitas Pembelajaran. *Transformasi : Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Non Formal Informal*, 11(1), 150–160. <https://doi.org/10.33394/jtni.v11i1.16867>
- Khanal, S., Zhang, H., & Taeihagh, A. (2025). Why and how is the power of Big Tech increasing in the policy process? The case of generative AI. *Policy and Society*, 44(1), 52–69. <https://doi.org/10.1093/polsoc/puae012>
- Latifah Ely Ma'ruf & Nur Rahmi Sonia. (2025). Supervisi Humanistik sebagai Pendekatan Inovatif dalam Pengembangan Kompetensi Guru di Era Digital. *Edumanagerial*, 4(2), 181–198. <https://doi.org/10.21154/edumanagerial.v4i2.5583>
- Leithwood, K., Harris, A., & Hopkins, D. (2020). Seven strong claims about successful school leadership revisited. *School Leadership & Management*, 40(1), 5–22. <https://doi.org/10.1080/13632434.2019.1596077>
- Lembong, J. M., Lumapow, H. R., & Rotty, V. N. J. (2023). Implementasi Merdeka Belajar Sebagai Transformasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(2), 765–777. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i2.4620>
- Lepcha, A., Kumar, R., Dindhoria, K., Bhargava, B., Pati, A. M., & Kumar, R. (2025). Metagenomic insights into the functional potential of non-sanitary landfill microbiomes in the Indian Himalayan region, highlighting key plastic degrading genes. *Journal of Hazardous Materials*, 484, 136642. <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2024.136642>
- M. Stracke, C., Griffiths, D., Pappa, D., Bećirović, S., Polz, E., Perla, L., Di Grassi, A., Massaro, S., Prifti Skenduli, M., Burgos, D., Punzo, V., Amram, D., Ziouvelou, X., Katsamori, D., Gabriel, S., Nahar, N., Schleiss, J., & Hollins, P. (2025). Analysis of Artificial Intelligence Policies for Higher Education in Europe. *International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence*, 9(2), 124–137. <https://doi.org/10.9781/ijimai.2025.02.011>
- Mandinach, E. B., & Gummer, E. S. (2016). What does it mean for teachers to be data literate: Laying out the skills, knowledge, and dispositions. *Teaching and Teacher Education*, 60, 366–376. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2016.07.011>
- Mandinach, E. B., & Schildkamp, K. (2021). Misconceptions about data-based decision making in education: An exploration of the literature. *Studies in Educational Evaluation*, 69, 100842. <https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2020.100842>
- Martin, S. S., Aday, A. W., Almarzooq, Z. I., Anderson, C. A. M., Arora, P., Avery, C. L., Baker-Smith, C. M., Barone Gibbs, B., Beaton, A. Z., Boehme, A. K., Commodore-Mensah, Y., Currie, M. E.,

- Elkind, M. S. V., Evenson, K. R., Generoso, G., Heard, D. G., Hiremath, S., Johansen, M. C., Kalani, R., ... on behalf of the American Heart Association Council on Epidemiology and Prevention Statistics Committee and Stroke Statistics Subcommittee. (2024). 2024 Heart Disease and Stroke Statistics: A Report of US and Global Data From the American Heart Association. *Circulation*, *149*(8). <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000001209>
- Muha, S. M. L., & Silitonga, S. P. (2025). Defense Human Resources Competency Development Strategy for Adaptation in the Era of Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity. *Jurnal Pendidikan Dan Pengembangan Sumber Daya Pertahanan*, *2*(1), 74–82. <https://doi.org/10.63210/jp3.v2i1.135>
- Munawir, M., & Muhidin, N. M. (2025). Menjadi Guru Profesional di Abad 21: Keterampilan Dalam Literasi Digital. *Jurnal Pendidikan*, *34*(2), 145–156. <https://doi.org/10.32585/jp.v34i2.6696>
- Nguyen, D. C., & Welch, C. (2026). Generative Artificial Intelligence in Qualitative Data Analysis: Analyzing—Or Just Chatting? *Organizational Research Methods*, *29*(1), 3–39. <https://doi.org/10.1177/10944281251377154>
- Ni Ketut Erna Muliastri. (2025). Pengembangan Strategi Pembelajaran Berbasis Karakter untuk Meningkatkan Literasi Sains Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Citra Pendidikan Anak*, *4*(1), 1–14. <https://doi.org/10.38048/jcpa.v4i1.5143>
- Ningrum, L. I., Kusumaningsih, W., & Soedjono, S. (2025). Pengaruh Kepemimpinan Instruksional Kepala Sekolah dan Modal Psikologis terhadap Kompetensi Profesional Guru: Studi Korelasi di Sekolah Dasar Indonesia. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, *9*(5), 1418–1432. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v9i5.7056>
- Norainun, N. (2024). Kebijakan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Sarana dan Prasarana di Madrasah Aliyah Swasta Desa Teluk Tigo Kecamatan Cerminan Gedang Kabupaten Sarolangun. *Jurnal Pendidikan Siber Nusantara*, *2*(1), 28–42. <https://doi.org/10.38035/jpsn.v2i1.166>
- Nur Efendi & Muh Ibnu Sholeh. (2023). Manajemen Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran. *Academicus: Journal of Teaching and Learning*, *2*(2), 68–85. <https://doi.org/10.59373/academicus.v2i2.25>
- Nyaaba, M., Wright, A. L., & Choi, G. L. (2026). Generative AI and digital neocolonialism in global education: Towards an equitable framework. *Journal of Digital Educational Technology*, *6*(1), ep2608. <https://doi.org/10.30935/jdet/17862>
- Oo, Z. W., Adams, D., Pov, S., & Nguyen, N. (2025). Shaping leadership and inclusive education: Insights from Cambodia, Myanmar, and Vietnam. *International Journal of Developmental Disabilities*, *71*(6), 824–836. <https://doi.org/10.1080/20473869.2025.2504444>
- Ozamiz-Etxebarria, N., Idoiaga Mondragon, N., Bueno-Notivol, J., Pérez-Moreno, M., & Santabárbara, J. (2021). Prevalence of Anxiety, Depression, and Stress among Teachers during the COVID-19 Pandemic: A Rapid Systematic Review with Meta-Analysis. *Brain Sciences*, *11*(9), 1172. <https://doi.org/10.3390/brainsci11091172>
- Pahlawanita Damayanti, D. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Satuan Pendidikan Nonformal di Indonesia. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *8*(7), 7033–7043. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i7.8232>
- Perez, G., Barber, G. P., Benet-Pages, A., Casper, J., Clawson, H., Diekhans, M., Fischer, C., Gonzalez, J. N., Hinrichs, A. S., Lee, C. M., Nassar, L. R., Raney, B. J., Speir, M. L., van Baren, M. J., Vaske, C. J., Haussler, D., Kent, W. J., & Haeussler, M. (2025). The UCSC Genome Browser database: 2025 update. *Nucleic Acids Research*, *53*(D1), D1243–D1249. <https://doi.org/10.1093/nar/gkae974>
- Prenger, R., Poortman, C. L., & Handalzalts, A. (2019). The Effects of Networked Professional Learning Communities. *Journal of Teacher Education*, *70*(5), 441–452. <https://doi.org/10.1177/0022487117753574>
- Putu Ayu Novita & Yohana F. Cahya Palupi Meilani. (2025). REKONSTRUKSI TEORI KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN: MEMBANGUN KERANGKA HOLISTIK BAGI SEKOLAH ABAD KE-21 [RECONSTRUCTING EDUCATIONAL LEADERSHIP THEORY: BUILDING A HOLISTIC FRAMEWORK FOR 21ST CENTURY SCHOOLS]. *Feedforward: Journal of Human Resource*, 28–40. <https://doi.org/10.19166/ff.v5i1.9577>
- Ramadhan, S., & Megawati, S. (2022). Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya. *Publika*, 1581–1592. <https://doi.org/10.26740/publika.v11n1.p1581-1592>
- Ratnawati, R., & Lestari, G. D. (2025). Integrasi Teknologi dalam Difusi Inovasi Pendidikan :Pendekatan

- Kepemimpinan Kolaboratif Di Era Digital. *Consilium: Education and Counseling Journal*, 5(1), 572. <https://doi.org/10.36841/consilium.v5i1.5980>
- Restu Rahayu & Sofyan Iskandar. (2023). Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah Dalam Pembelajaran Abad 21 Di Sekolah Dasar. *Jurnal Elementaria Edukasia*, 6(2), 287–297. <https://doi.org/10.31949/jee.v6i2.5484>
- Riedho, M. R. Z., & Angga, I. M. P. (2024). Membangun Silogisme Pendekatan Naratif dalam Proses Pembuatan dan Analisis Kebijakan Publik William N. Dunn. *Jejaring Administrasi Publik*, 16(1), 12–32. <https://doi.org/10.20473/jap.v16i1.53502>
- Robinson, A. P. L., Zepf, M., Kar, S., Evans, R. G., & Bellei, C. (2008). Radiation pressure acceleration of thin foils with circularly polarized laser pulses. *New Journal of Physics*, 10(1), 013021. <https://doi.org/10.1088/1367-2630/10/1/013021>
- Rohmatika, D. (2023). Kebijakan Merdeka Belajar dan Implikasinya dalam Pembelajaran di Sekolah Menengah Atas. *Dirasat: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*, 9(1), 92–103. <https://doi.org/10.26594/dirasat.v9i1.3640>
- Rosidin, A., Sudirman, S., Mufti, M. I., Pramono, S. A., Susanty, L., Dudin, A., Ernawati, Arifin, A., & R, M. D. (2025). Exploring Educational Policy Innovations and Curriculum Development in Indonesian Higher Education: A Systematic Review. *Journal of Education Culture and Society*, 16(2), 943–958. <https://doi.org/10.15503/jecs2025.3.943.958>
- Sari, N. K. (2020). Analisis Framing Pemberitaan Pidato Menteri Nadiem Makarim Pada Peringatan Hari Guru Nasional. *JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN)*, 3(1), 12–22. <https://doi.org/10.36341/jdp.v3i1.1092>
- Slamet Riyadi. (2025). Implementasi Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(1), 1983–1989. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1881>
- Sosa-Díaz, M. J., Sierra-Daza, M. C., Arriazu-Muñoz, R., Llamas-Salguero, F., & Durán-Rodríguez, N. (2022). “EdTech Integration Framework in Schools”: Systematic Review of the Literature. *Frontiers in Education*, 7, 895042. <https://doi.org/10.3389/educ.2022.895042>
- Spillane, J. P., Reiser, B. J., & Reimer, T. (2002). Policy Implementation and Cognition: Reframing and Refocusing Implementation Research. *Review of Educational Research*, 72(3), 387–431. <https://doi.org/10.3102/00346543072003387>
- Taeihagh, A. (2025). Governance of Generative AI. *Policy and Society*, 44(1), 1–22. <https://doi.org/10.1093/polsoc/puaf001>
- Umami, S., & Wahyudi, K. (2025). Strategi Kepemimpinan Transformasional dalam Menghadapi Tantangan Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(3), 3550–3559. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i3.7542>
- Waruwu, S. Y., Zalukhu, I. F. N., Zalukhu, Y., & Harefa, H. O. N. (2025). Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di Sekolah. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 6(2), 293–301. <https://doi.org/10.54371/ainj.v6i2.841>
- Wati, S., & Nurhasannah, N. (2024). Penguatan Kompetensi Guru Dalam Menghadapi Era Digital. *Jurnal Review Pendidikan Dasar : Jurnal Kajian Pendidikan Dan Hasil Penelitian*, 10(2), 149–155. <https://doi.org/10.26740/jrpd.v10n2.p149-155>
- Wayman, S., Kissing Kucek, L., Mirsky, S. B., Ackroyd, V., Cordeau, S., & Ryan, M. R. (2017). Organic and conventional farmers differ in their perspectives on cover crop use and breeding. *Renewable Agriculture and Food Systems*, 32(4), 376–385. <https://doi.org/10.1017/S1742170516000338>
- Zhang, B., Li, J., Zhou, J., Chow, L., Zhao, G., Huang, Y., Ma, Z., Zhang, Q., Yang, Y., Yiu, C. K., Li, J., Chun, F., Huang, X., Gao, Y., Wu, P., Jia, S., Li, H., Li, D., Liu, Y., ... Yu, X. (2024). A three-dimensional liquid diode for soft, integrated permeable electronics. *Nature*, 628(8006), 84–92. <https://doi.org/10.1038/s41586-024-07161-1>